

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 561/Ekonomi Pembangunan

Bidang Fokus : Bidang X

USULAN PENELITIAN DOSEN



PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI

TIM PENGUSUL

Ketua	: Yunie Rahayu, SE, ME	NIDN :1021067804
Anggota	: Ahmad Soleh, SE, ME	NIDN : 1015058502
	Marni	NPM : 1810075602225


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI

2023


HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia ...
Terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan
Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi
2. Peserta Program : Penelitian
3. Tim Penelitian
 - a. Ketua Tim Peneliti
 - a. Nama : Yunie Rahayu, SE, ME
 - b. NIDN : 1021067804
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor
 - d. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi
 - f. Alamat Kantor/Telp/Email : yunierahayu.2106@gmail.com
 - b. Anggota Tim Peneliti
 - I. a. Nama : Ahmad Soleh, SE, ME
 - b. NIDN : 1015058502
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor
 - d. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi
 - f. Alamat Kantor/Telp/Email : mas.soleh@yahoo.com
 - II. a. Nama : Marni
 - b. NPM : 1810075602225
 - c. Jabatan Fungsional : -
 - d. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi
 - f. Alamat Kantor/Telp/Email : marni2021@gmail.com
4. Lokasi Kegiatan
 - a. Wilayah : Negara Indonesia
 - b. Provinsi : Jambi
5. Lama Penelitian : 3 Bulan
6. Biaya Total Penelitian : Rp. 1.500.000
 - Dana Perguruan Tinggi : Rp. 1.500.000,00
 - Dana Institusi Lain : Rp. 0,00

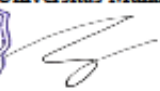
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Hasan Basri, SE, M.Si
NIDN: 1015116801

Jambi, Desember 2022
Peneliti,


Yunie Rahayu, SE, ME
NIDN: 1021067802

Menyetujui,
Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Jambi


Prima Audia Daniel, SE, ME
NIDK.8852530017



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi fenomena sepanjang sejarah Indonesia. Kemiskinan telah menjadikan jutaan anak-anak Indonesia tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas dan kesulitan membiayai kesehatan. Selain itu, kemiskinan juga menyebabkan kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, disertai kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan terbatasnya perlindungan terhadap keluarga. Lebih jauh kemiskinan meningkatkan arus urbanisasi ke kota, dan lebih parah lagi kemiskinan menyebabkan jutaan penduduk tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan. Kemiskinan menyebabkan banyaknya penduduk yang harus membanting tulang dan mengerahkan seluruh tenaga hanya untuk mendapatkan upah yang mulanya hanya bisa mencukupi untuk kebutuhan makan saja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan yang lain (Bappenas).

Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk (a) memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (b) hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum (c) hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (d) hak rakyat untuk akses atas kebutuhan hidup (sandang, papan dan pangan) yang terjangkau; (e) hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (f) hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (g) hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (h) hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan public dan pemerintahan; (i) hak rakyat berinovasi; (j) hak rakyat untuk menjalankan hubungan sipiritualnya dengan tuhan, dan (k) hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintah dengan baik (Bappenas).

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan makro yang dihadapi setiap wilayah. Pengukuran tingkat kemiskinan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya perlu untuk diketahui untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut. Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan perkapita suatu daerah maka akan meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Pembangunan dikatakan berhasil jika terjadi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan per kapita, tingkat pengangguran rendah, berkurangnya jumlah penduduk miskin dan distribusi pendapatan yang semakin merata. Jadi salah satu indikator

berhasilnya pembangunan adalah ditunjukkan oleh indikator kemiskinan. Sehingga sasaran utama dari pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Seluruh masyarakat akan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi melalui *trickle down effect* (efek tetesan kebawah). Peningkatan kekayaan para investor akan disertai tetesan kekayaan mereka ke lapisan masyarakat bawah, bentuk manfaat yang diperoleh masyarakat dengan tetesan kemakmuran orang-orang kaya tersebut misalnya upah yang mereka dapatkan sebagai buruh pabrik. Tetesan kemakmuran inilah yang diyakini bisa memecahkan permasalahan kemiskinan. Pendapat ini sampai dengan akhir tahun 1960-an.

Memasuki tahun 1970-an, para ahli ekonomi mulai meragukan manfaat pertumbuhan Produk Domestik Bruto karena di banyak negara sedang berkembang meskipun standar kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang stabil, tetapi terdapat gejala meningkatnya kemiskinan absolute, ketimpangan distribusi pendapatan, dan pengangguran. Kemudian muncul pendapat jika peningkatan pembangunan tersebut tidak dilakukan secara merata mustahil akan memberikan hasil yang maksimal.

Dengan semakin berkembangnya pendapat bahwa pembangunan ekonomi akan memberikan hasil yang maksimal jika peningkatan produk domestik bruto diikuti dengan perbaikan kualitas standar hidup seluruh masyarakat termasuk masyarakat yang berpendapatan rendah. Para ahli ekonomi mulai menganalisis dan mempelajari variable-variabel ekonomi makro tertentu yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Menurut Khandker dan Haughton (2012) diperlukan penjelasan logis mengapa beberapa orang tergolong miskin bila kita ingin memberantas akar masalah kemiskinan. Ada beberapa penyebab utama yang berhubungan dengan kemiskinan seperti karakteristik wilayah, karakteristik masyarakat, karakteristik rumah tangga, dan individu. Pada tingkat wilayah banyak sekali sifat yang bisa dihubungkan dengan kemiskinan. Kemiskinan yang tinggi terjadi pada daerah dengan isolasi geografi, basis sumber daya rendah, kerentanan terhadap bencana serta institusi domestik. Pada tingkat masyarakat, infrastruktur merupakan faktor penentu utama kemiskinan. Kualitas jalan, ketersediaan listrik, akses ke pasar, ketersediaan sarana pendidikan, dan kesehatan mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan wilayah dan kemiskinan suatu

daerah. Struktur rumah tangga seringkali berbeda antara rumah tangga miskin dan tidak miskin. Jumlah anggota rumah tangga, struktur usia, dan rasio ketergantungan menjadi penentu kesejahteraan suatu rumah tangga.

Kemiskinan menyebar secara tidak merata antarnegara atau antardaerah dalam suatu Negara. Kemiskinan biasanya berpusat di daerah pedesaan atau daerah yang kurang sumber daya. Beban kemiskinan yang terbesar juga pada kelompok-kelompok tertentu yaitu wanita dan anak-anak. Indikator kemiskinan yang digunakan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolute. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi garis kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin.

Masalah kemiskinan juga dapat dilihat dari tiga indikator, yang pertama adalah tingkat kemiskinan, yang kedua adalah indeks kedalaman kemiskinan dan yang terakhir adalah indeks keparahan kemiskinan. Tingkat kemiskinan merupakan perkembangan jumlah penduduk miskin tahun sekarang dibanding tahun sebelumnya. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan merupakan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index – P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (BPS, 2013). Untuk melihat jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 1.1

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Jambi selama tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi. Seharusnya jumlah penduduk miskin setiap tahunnya dapat diturunkan. Hal ini diduga disebabkan oleh indeks pembangunan manusia (IPM). Menurut Mulyaningsih (2008), IPM memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (*Longevity*) dan hidup sehat (*healthy life*), untuk mendapatkan pengetahuan (*the knowledge*) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya, tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan. Lanjouwet

al.(2001) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Sejalan dengan pendapat tersebut, penelitian yang dilakukan Suliswanto (2010) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Ribuan Jiwa)

Kabupaten/Kota	Tahun (Ribuan Jiwa)						Rata-Rata
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kerinci	17,62	17,62	16,79	17,00	17,48	18,45	17,49
Merangin	32,88	33,92	33,95	32,88	33,92	35,44	33,83
Sarolangun	26,37	25,61	25,7	25,39	25,79	27,06	25,99
Batanghari	28,39	27,49	27,55	26,53	26,54	27,24	27,29
Muaro Jambi	17,52	18,28	17,38	16,86	17,3	20,49	17,97
Tanjung Jabung Timur	27,42	27,22	26,99	25,35	24,23	24,42	25,94
Tanjung Jabung Barat	37,24	36,33	36,28	35,12	34,78	36,1	35,98
Tebo	23,04	23,18	22,86	22,83	22,47	23,77	23,03
Bungo	20,96	20,81	21,11	20,87	33,07	23,64	23,41
Kota Jambi	51,61	52,08	50,61	48,95	50,44	54,23	51,32
Sungai Penuh	2,75	2,46	2,48	2,55	2,78	3,03	2,68
Provinsi Jambi	289,81	286,55	281,69	274,32	277,8	293,86	284,01
Rata-Rata	25,98	25,91	25,61	24,94	26,25	26,72	25,90

Sumber : Badan Pusat Statistik Jambi, Publikasi tahun 2017- 2022

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa IPM di kabupaten/kota Provinsi Jambi selama tahun 2016 sampai tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan. Seharusnya meningkatnya IPM dapat menurunkan angka kemiskinan, hal ini diduga ada terjadi keraguan dengan teori peningkatan IPM dapat mengurangi kemiskinan, sehingga penelitian ini harus diteliti lebih lanjut.

Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota Provinsi Jambi 2016-2021

Kabupaten /Kota	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kerinci	69,7	70	70,6	71	71,2	71,45
Merangin	67,9	68,3	68,8	69,1	69,2	69,53
Sarolangun	68,7	69	69,4	69,7	69,9	70,25
Batang Hari	68,7	68,9	69,3	69,7	69,8	70,11
Muaro Jambi	67,6	67,9	68,3	69	69,2	69,55
Tanjabtlim	61,9	62,6	63,3	63,9	64,4	64,91
Tanjabbar	65,9	66,2	67,1	67,5	67,5	68,16
Tebo	68,1	68,2	68,7	69	69,1	69,35
Bungo	68,8	69	69,4	69,9	69,9	70,15
Kota Jambi	76,1	76,7	77,4	78,3	78,4	79,12
Kota Sungai Penuh	73,4	73,8	74,7	75,4	75,4	75,7
Provinsi Jambi	68,8	69,1	69,7	70,2	70,4	71,63

Sumber: BPS Provinsi Jambi, Publikasi Tahun 2017 - 2022

Dari uraian diatas, kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jambi dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan yang masih mengalami fluktuasi. Kesenjangan indeks kedalaman kemiskinan terjadi dipengaruhi oleh IPM yang bervariasi pada setiap daerah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh persoalan kemiskinan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kondisi indeks pembangunan manusia dan indeks kedalaman kemiskinan pada kabupaten/kota Provinsi Jambi serta pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap indeks kedalaman kemiskinan pada kabupaten/kota Provinsi Jambi selama periode tahun 2010-2021.

BAB II. LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kemiskinan

Kemiskinan dapat dicirikan keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga Negara (Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN). Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.

Menurut Chambers (1998) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

Kemiskinan dapat dibagi dengan empat bentuk (Suryawati, 2005), yaitu: (1) kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja; (2) kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan; (3) kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar; (4) kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2004), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada di lapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antar wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis ukuran penduduk, ukuran ini sering disebut juga dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki garis kemiskinan dibawah maka dinyatakan dalam kondisi miskin.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya. Menurut BPS (2004), kemiskinan pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang berkaitan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang terbatas pada kebutuhan pokok sehingga orang tersebut dapat disebut hidup dengan layak. Kemiskinan absolut diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya tersebut dengan tujuan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, seseorang dikatakan miskin absolut apabila pendapatan yang diperolehnya kurang dari garis kemiskinan dan tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya. Menurut BPS, nilai nominal garis kemiskinan DIY tercatat sebesar Rp 354.000 per kapita per bulan di Bulan Maret 2016.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif dilihat dari aspek ketimpangan sosial. Apabila seseorang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, namun masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut termasuk kategori miskin relatif. Semakin tinggi kesenjangan tingkat pendapatan antara golongan atas dengan golongan bawah maka akan semakin tinggi pula jumlah penduduk miskin. Dengan demikian, kemiskinan relatif berhubungan erat dengan distribusi pendapatan.

Sastraatmadja (2007) menyebutkan bahwa kemiskinan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:

1. Persistent poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun
2. Cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan
3. Seasonal poverty, yaitu kemiskinan musiman yang sering ditemui pada kasus nelayan dan pertanian.
4. Accident poverty, yaitu kemiskinan yang tercipta karena adanya bencana alam, konflik dan kekerasan atau akibat dari suatu kebijakan yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Menurut Suharto (2005:133) ciri-ciri kemiskinan itu terdiri dari :

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (papan, sandang, pangan).
- b. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti
 - a) Kesehatan
 - b) Pendidikan
 - c) Sanitasi

- d) Air bersih
- e) Transportasi
- c. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiada investasi untuk pendidikan dan keluarga)
- d. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun masal
- e. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam
- f. Keterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat
- g. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
- h. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental
- i. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial seperti anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga (KDRT), janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil.

Kriteria Miskin Menurut Standar BPS dapat dilihat sebagai berikut :

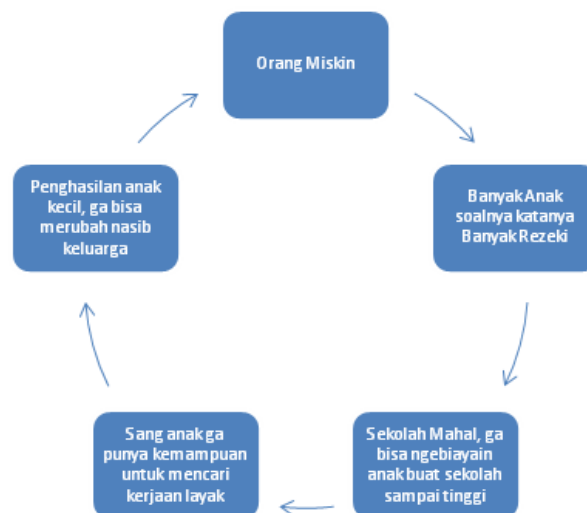
1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.

14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Menurut Sayogyo dalam Suryawati (2005), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan.

Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2010) sebagai berikut :

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitas nya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berate produktivitasnya juga akan rendah, upahnya nya pun rendah.
3. kemiskinan muncul karena adanya akses modal. Ketiga penyebab kemiskinan itu bermuara pada lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty) lihat gambar 2.1. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, redahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya.



Logika berpikir yang dikemukakan Nurkse yang dikutip Kuncoro (2010) yang mengemukakan bahwa Negara miskin itu karena dia miskin (*a poor country is poor*

because it is poor). Dalam mengemukakan teorinya tentang lingkaran setan kemiskinan, pada hakikatnya Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi juga disebabkan oleh hambatan pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse mengatakan : “Suatu Negara menjadi miskin karena ia merupakan Negara miskin” (*A country is poor because is poor*).

Menurut pendapatnya inti dari lingkaran setan kemiskinan adalah keadaankeadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya pembentukan modal yang tinggi. Di satu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan dan di lain pihak oleh perangsang untuk menanam modal. Di Negara berkembang kedua faktor itu tidak memungkinkan dilaksanakannya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Jadi, menurut pandangan Nurkse, terdapat dua jenis lingkaran setan kemiskinan yang menghalangi Negara berkembang mencapai pembangunan yang pesat yaitu.

Dari segi penawaran modal dan permintaan modal. Dari segi penawaran modal lingkaran setan kemiskinan dapat dinyatakan sebagai berikut. Tingkat pendapatan masyarakat rendah yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah. Ini akan menyebabkan suatu Negara menghadapi kekurangan barang modal dan dengan demikian tingkat produktivitasnya akan tetap rendah yang akan mempengaruhi kemiskinan.

Dari segi permintaan modal, corak lingkaran setan kemiskinan mempunyai bentuk yang berbeda di setiap negara. Di Negara-negara miskin perangsang untuk melaksanakan penanaman modal rendah karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas, dan hal ini disebabkan oleh pendapatan masyarakat rendah. Sedangkan pendapatan masyarakat yang rendah disebabkan oleh produktivitasnya rendah ditunjukkan oleh pembentukan modal yang terbatas pada masa lalu dan mengakibatkan pada masa yang akan datang. Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan oleh kekurangan perangsang untuk menanam modal, sehingga kemiskinan tidak berujung pada pangkalnya.

2.1.2 Konsep Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) dikutip dari BPS (2019). Selanjutnya garis kemiskinan menurut World Bank (2005) adalah standar ukur yang ditetapkan untuk mengukur seseorang dalam kemiskinan. GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, lemak, dll). GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Garis kemiskinan ini dibedakan antara perkotaan dan perdesaan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil sehingga kita dapat mengurangi angka kemiskinan dengan menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam mengentaskan kemiskinan di sepanjang waktu.

Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan yaitu (BPS, 2019):

1. Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). GKS adalah GK periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
2. GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita/hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut.
3. Selanjutnya GKM tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi.
4. GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi

rumah tangga per komoditi nonmakanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi.

5. GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita/bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Selanjutnya dihitung jumlah penduduk dibawah GK untuk tingkat kabupaten/kota.
6. Melakukan *prorate* jumlah penduduk miskin kabupaten/kota yang diperoleh pada langkah sebelumnya, terhadap jumlah penduduk miskin propinsi yang dihasilkan dengan menggunakan data Susenas.
7. Dari jumlah penduduk miskin yang diperoleh dari hasil *prorate*, maka dihitung persentase penduduk miskin dan Garis Kemiskinan (GK) dari seluruh kabupaten/kota. Penghitungan GK kabupaten/kota dilakukan sebagai dasar dalam penghitungan indeks kedalaman kemiskinan/*proverty gap index* (P1).

2.1.3 Indikator Kemiskinan

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yang dialami seseorang atau sekelompok orang adalah indikator kemiskinan yang digunakan oleh Bappenas (2004). Indikator kemiskinan yang dimaksud adalah :

1. Keterbatasan pangan, merupakan ukuran yang melihat kecukupan pangan dan mutu pangan yang dikonsumsi. Ukuran indikator ini adalah stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin, dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu.
2. Keterbatasan akses kesehatan, merupakan ukuran yang melihat keterbatasan akses kesehatan dan rendahnya mutu layanan kesehatan. Keterbatasan akses kesehatan dilihat dari kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya layanan reproduksi, jauhnya jarak fasilitas layanan kesehatan, mahalnya biaya pengobatan dan perawatan. Kelompok miskin umumnya cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas dibandingkan dengan rumah sakit.
3. Keterbatasan akses pendidikan. Indikator ini diukur dari mutu pendidikan yang tersedia, mahalnya biaya pendidikan, terbatasnya fasilitas pendidikan, rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan.
4. Keterbatasan akses pada pekerjaan. Indikator ini diukur dari terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap asset usaha, perbedaan upah, lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan.

5. Keterbatasan akses terhadap layanan perumahan dan sanitasi. Indikator yang digunakan adalah kesulitan memiliki rumah yang sehat dan layak huni, dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak.
6. Keterbatasan akses terhadap air bersih. Indikator yang digunakan adalah sulitnya mendapatkan air bersih, terbatasnya penguasaan sumber air, dan rendahnya mutu sumber air.
7. Keterbatasan akses terhadap tanah. Indikator yang digunakan adalah struktur kepemilikan dan penguasaan tanah, ketidakpastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Akses terhadap tanah ini merupakan persoalan yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga petani.
8. Keterbatasan akses terhadap sumber daya alam. Indikator yang digunakan adalah buruknya kondisi lingkungan hidup, rendahnya sumber daya alam. Indikator ini sangat terkait dengan penghasilan yang bersumber dari sumber daya alam, seperti daerah perdesaan, daerah pesisir, dan daerah pertambangan.
9. Tidak adanya jaminan rasa aman, indikator ini berkaitan dengan tidak terjaminnya keamanan dalam menjalani kehidupan baik sosial maupun ekonomi. -Keterbatasan akses untuk partisipasi. Indikator ini diukur melalui rendahnya keterlibatan dalam pengambilan kebijakan.
10. Besarnya beban kependudukan, indikator ini berkaitan dengan besarnya tanggungan keluarga, dan besarnya tekanan hidup.

2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan

Menurut Todaro (2011) faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat pendapatan nasional negara terbilang rendah dan laju pertumbuhannya berjalan lambat.
2. Pendapatan perkapita rendah dan pertumbuhannya sangat lambat atau bahkan stagnasi.
3. Terjadi ketimpangan distribusi pendapatan.
4. Mayoritas penduduk hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut.
5. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi.
6. Fasilitas pendidikan dan kurikulum kurang memadai.

Sharp et al (2002) mengidentifikasi penyebab kemiskinan adalah:

1. Secara makro, kemiskinan terjadi karena ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang membuat distribusi pendapatan yang timpang, dimana penduduk miskin hanya mempunyai sumber daya yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan terjadi karena perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah mengindikasikan produktivitas yang rendah yang menyebabkan rendahnya upah. Kualitas sumber daya manusia yang rendah disebabkan pendidikan yang rendah, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.
3. Kemiskinan ada karena perbedaan akses modal. Nurkse (1953) menyebutkan bahwa ketiga penyebab kemiskinan di atas bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan, yaitu adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktivitas. Produktivitas yang rendah menyebabkan rendahnya upah yang diterima yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berdampak pada keterbelakangan dan seterusnya.

Suroso (2006) menyebutkan kemiskinan yang terjadi di negara miskin disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Kemiskinan alami, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena keadaan alam suatu wilayah atau negara yang tidak subur dan tidak mempunyai sumber daya alam potensial. Namun, faktor ini mendapat kritikan.
2. Kemiskinan karena penjajahan. Negara yang mengalami penjajahan dalam waktu yang lama akan menjadi miskin karena diperas oleh penjajah. Namun, faktor ini juga mendapat kritikan.
3. Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural. Kemiskinan ini turun temurun dari nenek moyang karena sulitnya merubah kebiasaan penduduk. Misalnya suku-suku di pedalaman.
4. Kemiskinan karena lokasi yang terisolasi. Kemiskinan daerah yang disebabkan karena daerah tersebut jauh dari perkotaan dan sulitnya jalur transportasi.
5. Kemiskinan struktural. Kemiskinan yang disebabkan karena adanya perbedaan antara kota dengan desa dan adanya persaingan yang tidak seimbang antara daerah yang mempunyai keunggulan komparatif dengan daerah yang tidak memiliki keunggulan komparatif.

Selain faktor-faktor di atas, kemiskinan pada suatu negara, juga disebabkan karena :

1. Mata pencaharian utama penduduk adalah pertanian

Negara yang mata pencaharian utama penduduknya pertanian akan menyebabkan negara tersebut miskin. Hal ini disebabkan produktivitas pertanian lebih rendah daripada sektor industri dan jasa, apalagi pertanian yang dilakukan penduduk masih bersifat tradisional dengan waktu lama dan harga jual yang kurang layak, menyebabkan rendahnya pendapatan dari sektor pertanian.

2. Ekonomi dualitas.

Perekonomian dualitas merupakan perekonomian yang berpusat pada dua pihak. Pihak pertama berpusat pada perekonomian pasar dan lainnya berekonomi pertanian. Ekonomi pasar mempunyai ciri modern, sedangkan ekonomi pertanian terbelakang. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan pendapatan pada penduduk kota dan desa.

3. Sumber alam yang kurang terolah

Sumber daya alam yang kurang terolah menyebabkan negara tidak mampu berkembang untuk mencari sumber daya alam yang baru.

4. Pengangguran dan pengangguran tersembunyi

Pengangguran yang berpendidikan muncul karena mereka tidak mampu memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya.

5. Ketiadaan inisiatif dan usaha

Tidak adanya inisiatif dan usaha dari masyarakat untuk melakukan inovasi dalam pekerjaannya menjadikan masyarakat di wilayah tersebut tidak bisa berkembang dan mampu meningkatkan pendapatannya.

6. Kelangkaan modal

Negara terbelakang mempunyai modal dan tabungan yang sangat kecil. Investasi bruto hanya sekitar 5-6% dari pendapatan nasional bruto, sedangkan negara industri mencapai kira-kira 15-20%.

7. Keterbelakangan teknologi termin dalam ongkos produksi yang tinggi, upah buruh rendah, besarnya jumlah tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih dan mahalny barang-barang modal yang dipergunakan untuk memproduksi suatu produk.

2.1.5. Konsep Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* – P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (BPS ,2013). Nilai agregat dari *poverty gap index* menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana

pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

Penurunan nilai indeks Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Rumus penghitungannya sebagai berikut:

$$P_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^2$$

- P_1 : *Poverty Gap Index* atau Indeks Kedalaman Kemiskinan
 z : Garis Kemiskinan
 y_i : Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskian ($i= 1,2,\dots,q$), $y_i < z$
 q : Banyaknya jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan
 n : Jumlah Penduduk

2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut BPS (2016), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak

Menurut Latifah (2017) Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, diantaranya: Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih. Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana. Membentuk satu indeks komposit dari pada

menggunakan sejumlah indeks dasar. Teori *Human capital* berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi banyak manfaat, antara lain: diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, efisiensi produksi, peningkatan kesejahteraan dan tambahan pendapatan seseorang apabila mampu menyelesaikan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan di bawahnya. Pendidikan merupakan investasi penting dalam menghadapi masa depan dunia secara global. Untuk itu, pendidikan harus dapat menyiapkan generasi muda abad ke-21 yang unggul, berdaya saing tinggi dan mampu bekerjasama guna mencapai kemakmuran bagi setiap negara dan dunia.

Rahmat dan Bachtiar (2017) IPM ini juga disebut Human Development Indeks yang pertama kali dikembangkan Amarta Sen peraih nobel asal India dan Seorang ekonom asal Pakistan yang bernama Mahbub ul Haq. IPM adalah suatu komposit yang mengukur tingkat rata-rata pencapaian sebuah negara, ada 3 hal dasar suatu pembangunan manusia, yaitu *pertama*, panjang kehidupan (*length of life*) dengan mengukur angka harapan hidup sejak lahir; *kedua*, pendidikan (*education*) dengan mengukur dan mengkombinasikan pada jumlah orang dewasa yang melek huruf (dengan dua pertiga berat badan) dan rata-rata lamanya sekolah (dengan bobot sepertiga); *ketiga*, standar hidup yang layak, dengan mengukur pengeluaran rata-rata penduduk yang telah ditentukan (PPP Rupiah). Cara menghitung IPM digunakan rumus sebagai berikut:

$$IPM = (\text{Index } X_1 + \text{Index } X_2 + \text{Index } X_3) \dots \dots \dots (2.1)$$

Dimana:

X_1 = Harapan hidup (*length of life*)

X_2 = Tingkat pendidikan (*education*)

X_3 = Standar hidup yang layak (*decent standard of living*)

2.1.7. Komponen-komponen IPM

1. Indeks Harapan hidup

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun variabel e_0 diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk

menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel). Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program Mortpak. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandartkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

2. Indeks Pendidikan

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), dimana Lit merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

3. Indeks Hidup Layak

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP adjusted. Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan concern IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (Purchasing Power Parity).

2.1.8 Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia

Lembaga UNDP telah mempublikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia dalam ukuran kuantitatif yang disebut *Human Development Indeks* (HDI). Meskipun HDI merupakan alat ukur pembangunan SDM yang dirumuskan secara konstan, diakui tidak akan pernah menangkap gambaran pembangunan SDM secara sempurna.

Adapun indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi HDI adalah sebagai berikut:

- *Longevity*, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau *life expectancy of birth* dan angka kematian bayi per seribu penduduk atau *infant mortality rate*.
- *Educational Achievement*, diukur dengan dua indikator, yakni melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (*adult literacy rate*) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 ke atas (*the mean years of schooling*).
- *Access to resource*, dapat diukur secara makro melalui PDB riil perkapita dengan terminologi *purchasing power parity* dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.

Dalam melakukan pembangunan manusia tentunya tidak hanya memperhatikan pada tiga komponen yang menjadi tolok ukur dalam penentuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) saja, disamping hal-hal tersebut tentunya masih banyak aspek lain yang juga mempengaruhi yaitu dari berbagai aspek pembangunan manusia yang tidak dapat diukur seperti; moral, mental, spiritual, tanggung jawab dan lain sebagainya. Untuk itu dalam upaya mencapai kesejahteraan secara utuh kita jangan hanya terjebak untuk memprioritaskan pada peningkatan di tiga aspek yang menjadi tolok ukur IPM saja, tetapi juga perlu meningkatkan kualitas manusia dari aspek-aspek yang lainnya.

Angka harapan hidup adalah perkiraan jumlah tahun hidup di suatu wilayah dari sekelompok makhluk hidup tertentu. Angka harapan hidup merupakan cermin dari kondisi kesehatan penduduk yang memiliki kemampuan bertahan hidup atau umur lebih lama karena kesehatannya lebih baik.

Melek aksara atau melek huruf dalam arti sempit adalah kemampuan membaca dan menulis. Sedang dalam arti luas melek aksara adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang

berkaitan dengan berbagai situasi. Selain itu juga diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan menggunakannya untuk mengerti sebuah bacaan, mendengarkan perkataan, mengungkapkannya dalam bentuk tulisan, dan berbicara. Dalam perkembangan modern kata ini lalu diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain, atau dalam taraf bahwa seseorang dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca-tulis, sehingga dapat menjadi bagian dari masyarakat tersebut.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pendidikan penduduk maka perlu adanya penyelenggaraan pendidikan yang merata dan berkualitas. Pendidikan adalah usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi.

Standar hidup menunjuk ke kualitas dan kuantitas barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia bagi orang. Biasanya diukur oleh pendapatan nyata per orang, meskipun beberapa pengukuran lain dapat digunakan; contohnya adalah ketersediaan barang (seperti jumlah kulkas per 1000 orang), atau pengukuran kesehatan seperti harapan hidup.

Ide standar ini dapat berlawanan dengan kualitas hidup, yang memperhitungkan tidak hanya standar hidup material, tetapi juga faktor subyektif lainnya yang menyumbang bagi kehidupan seseorang, seperti hiburan, keamanan, sumber budaya, kehidupan sosial, kesehatan mental, dll. Cara yang lebih rumit untuk menghitung kesejahteraan harus digunakan untuk membuat keputusan semacam itu, dan seringkali hal ini bersangkutan dengan politik, dan oleh sebab itu kontroversial.

Menurut Todaro (2006) pembangunan manusia ada tiga komponen universal sebagai tujuan utama meliputi:

- a) Kecukupan, yaitu merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi akan menghentikan

kehidupan seseorang, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan. Jika satu saja tidak terpenuhi akan menyebabkan keterbelakangan absolut.

- b) Jati Diri, yaitu merupakan komponen dari kehidupan yang serba lebih baik adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai dirisendiri, untuk merasa diri pantas dan layak mengejar sesuatu, dan seterusnya. Semuanya itu terangkum dalam *self esteem* (jati diri).
- c) Kebebasan dari Sikap Menghamba, yaitu merupakan kemampuan untuk memiliki nilai universal yang tercantum dalam pembangunan manusia adalah kemerdekaan manusia. Kemerdekaan dan kebebasan di sini diartikan sebagai kemampuan berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran dari aspek-aspek materil dalam kehidupan. Dengan adanya kebebasan kita tidak hanya semata-mata dipilih tapi kitalah yang memilih.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data sekunder. Metode analisis data sekunder adalah suatu metode dalam menganalisis suatu permasalahan atau fenomena dalam ekonomi dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan, diolah, disajikan dan dilaporkan oleh pihak lain (Nasir, 2011). Metode pengumpulan data sekunder sering disebut dengan penggunaan bahan dokumen. Karena dalam hal ini peneliti tidak langsung melakukan penelitian sendiri tetapi meneliti dan memanfaatkan data yang telah dihasilkan oleh pihak lain.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data publikasi BPS yang meliputi data indeks pembangunan manusia dan indeks kedalaman kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data panel (*cross section* dan *time series*) sebanyak 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2021. Dalam penelitian ini digunakan variabel terikat indeks kedalaman kemiskinan dan variabel bebas yaitu indeks pembangunan manusia. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi.

3.3. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penyelesaian skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif. Analisis Deskriptif adalah analisis data yang dilakukan dengan cara merumuskan dan mengumpulkan data, mengklasifikasikan serta menginterpretasikan sehingga memberikan suatu keterangan gambaran yang ada. Masalah tersebut dianalisis menggunakan teori. Analisis kuantitatif adalah analisis yang digunakan untuk melihat secara empiris sejauh mana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Menganalisis perkembangan kemiskinan dilakukan secara deskriptif, untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap indeks kedalaman kemiskinan dilakukan secara kuantitatif dengan bantuan software Eviews dengan metode analisis regresi data panel.

3.3.1 Analisis Deskriptif

Dalam menjawab permasalahan pertama maka digunakan analisis deskriptif kualitatif digunakan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui dan menganalisa perkembangan variabel yang digunakan dalam penelitian. Untuk menghitung besarnya perkembangan

3.3.2 Analisis Kuantitatif

3.3.2.2 Regresi Data Panel

Untuk menjawab permasalahan kedua maka digunakan Analisis kuantitatif untuk mengetahui besarnya pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap indeks kedalaman kemiskinan maka dianalisa menggunakan persamaan regresi data panel. Untuk menguji permodelan regresi data panel ketiga estimasi model regresi dengan melakukan Uji Chow dan Uji Hausman yang ditujukan untuk menentukan apakah model data panel dapat diregresi dengan metode *Common Effect*, metode *Fixed Effect*, atau metode *Random Effect*. (Juanda, Bambang dan Junaidi.2012).

Dalam analisis ekonometrika pemilihan model merupakan salah satu langkah yang penting disamping pembentukan model teoritis dan model yang ditaksir, estimasi, pengujian hipotesis, peramalan, dan analisis mengenai implikasi dan kebijakan dari model tersebut. Dalam model data panel persamaan model dengan menggunakan data *time series* dan *cross section* yaitu :

$$IKK_i = F (IPM).....(3.3)$$

Dimana :

IKD = Indeks Kedalaman Kemiskinan

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

Model fungsi diatas dispesifikasi menggunakan pendekatan regresi data panel menjadi :

$$IKK_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPM_{1it} + e \dots\dots(3.4)$$

Dimana :

IKD = Indeks Kedalaman Kemiskinan

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

i = jumlah observasi (kab-kota) = 11

t = Tahun data observasi (Tahun/deret waktu)

β_0 = konstanta

β_i = koefisien (banyaknya peubah bebas)

e = eror

3.4 Pendekatan-Pendekatan dalam Regresi Data Panel

Ada tiga pendekatan dalam perhitungan model regresi data panel, yaitu :

1. Metode *Common- Constant (Pooled Ordinary Least Square/PLS)*

Pendekatan ini menggunakan metode OLS biasa. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana. Dalam estimasinya diasumsikan bahwa setiap unit individu memiliki intersep dan slope yang sama. Dengan kata lain, regresi panel data yang dihasilkan akan berlaku untuk setiap individu (Juanda dan Junaidi, 2012). Pada beberapa penelitian data panel, model ini sering kali tidak pernah digunakan sebagai estimasi utama karena sifat dari model ini yang tidak membedakan perilaku data sehingga memungkinkan terjadinya bias, namun model ini digunakan sebagai perbandingan dari kedua pemilihan model.

2. Metode *Fixed Effect (Fixed Effect Model/FEM)*

Pada metode ini, intersep pada regresi dapat dibedakan antar individu karena setiap individu dianggap mempunyai karakteristik tersendiri. Dalam membedakan intersepnya dapat digunakan Variable dummy, sehingga metode ini juga dikenal dengan model *Least Square Dummy Variable (LSDV)* (Juanda dan Junaidi, 2012). Pada metode

Fixed Effect estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobot (*no weight*) atau *Least Square Dummy Variable (LSDV)* dan dengan pembobot (*cross section weight*) atau *General Least Square (GLS)*. Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi heterogenitas antar unit cross section. Penggunaan model ini tepat untuk melihat perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis dalam menginterpretasi data. Pemilihan model antara *Common Effect* dengan *Fixed Effect* dapat dilakukan dengan pengujian *Likelihood Test Ratio* dengan ketentuan apabila nilai probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan α maka dapat diambil keputusan dengan menggunakan *Fixed Effect Model*.

3. Metode Random Effect (Random Effect Model/REM)

Model data panel pendekatan ketiga yaitu model efek acak (*random effect*). Dalam model efek acak, parameter-parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukkan ke dalam *error (error component model)*. Dengan menggunakan model efek acak ini, maka dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada model efek tetap. Hal ini berimplikasi parameter yang merupakan hasil estimasi akan jadi semakin efisien. Keputusan penggunaan model efek tetap ataupun acak ditentukan dengan menggunakan Uji Hausman. Dengan ketentuan apabila probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan α maka dapat digunakan metode *Fixed Effect*, namun apabila sebaliknya maka dapat memilih salah satu yang terbaik antara *Fixed Effect* dengan *Random Effect*.

3.4.1 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk menguji permodelan regresi data panel ketiga estimasi model regresi dengan melakukan Uji Chow, Uji Hausman dan Uji *Lagrange Multiplier* yang ditujukan untuk menentukan apakah model data panel dapat diregresi dengan metode *Common Effect*, metode *FixedEffect*, atau metode *Random Effect*. (Widarjono, 2006).

Chow test merupakan uji untuk membandingkan model *common effect* dengan *fixed effect* (Widarjono, 2009). *Chow test* dalam penelitian ini menggunakan program *Eviews*. Pengujian yang dilakukan menggunakan *Chow-test* atau *Likelihood ratio test*, dengan asumsi yaitu:

H_0 : model mengikuti *Pool*

H_1 : model mengikuti *Fixed*.

H_0 ditolak jika P -value lebih kecil dari nilai α . Sebaliknya, H_0 diterima jika P -value lebih besar dari nilai α . Nilai α yang digunakan sebesar 10%.

Hausman Test adalah pengujian yang membandingkan model *fixed effect* dengan *random effect* dalam menentukan model yang terbaik untuk digunakan sebagai model regresi data panel (Gujarati, 2012). Hausman *test* menggunakan program yang serupa dengan Chow *test* yaitu program *Eviews*. Pengujian yang dilakukan menggunakan Hausman test dengan asumsi, yaitu:

H_0 : model mengikuti *Random Effect*

H_1 : model mengikuti *Fixed Effect*.

H_0 ditolak jika P -value lebih kecil dari nilai α . Sebaliknya, H_0 diterima jika P -value lebih besar dari nilai α . Nilai α yang digunakan sebesar 10%.

Pengujian yang dilakukan dengan Uji *Lagrange Multiplier* dengan asumsi apabila nilai LM hitung lebih besar dari nilai kritis *Chi-Squares* maka artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect*. Hipotesis yang dibentuk dalam LM test adalah sebagai berikut :

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Random Effect Model*

H_0 ditolak jika P -value lebih kecil dari nilai α . Sebaliknya, H_0 diterima jika P -value lebih besar dari nilai α . Nilai α yang digunakan sebesar 10%.

3.4.2 Pengujian Hipotesis

Uji F dilakukan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh variabel-variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Untuk pengujian secara simultan (uji F) digunakan hipotesis sebagai berikut :

- $H_0 : \beta_1, \dots, \beta_n = 0$, semua variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
- $H_1 : \beta_1, \dots, \beta_n \neq 0$, semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat.

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai p -value atau prob(F -statistik) dengan $\alpha = 1\%, 10\%, 10\%$. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

- Jika $p\text{-value} < \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y.
- Jika $p\text{-value} > \alpha$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y.

3.4.3 Secara Parsial dengan Menggunakan Uji t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh parsial dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian secara parsial menggunakan hipotesis sebagai berikut :

- $H_0 : \beta = 0$, tidak ada pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat.
- $H_1 : \beta \neq 0$, ada pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat.

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai p-value atau prob(t-statistik) dengan $\alpha = 1\%, 10\%, 10\%$. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

- Jika p-value $< \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan.
- Jika p-value $> \alpha$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

3.5. Operasional Variabel

1. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jambi selama tahun 2010-2021 yang dinyatakan dalam satuan persen.
2. Indeks Pembangunan Manusia adalah nilai komposit dari pada pembangunan manusia yang dihitung dalam 4 komponen yaitu lamanya hidup, tingkat pendidikan, tingkat kehidupan yang layak dan tingkat kesehatan kabupaten/kota Provinsi Jambi selama tahun 2010-2021 yang diukur dalam satuan angka.

BAB IV. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan (Rp)
1	Transportasi	250.000,-
2	Pembelian bahan habis pakai	400.000,-
3	Konsumsi	250.000,-
4	Penerbitan Jurnal	600.000,-
Jumlah		1.500.000,-

Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun Ke-1 (Bulan Ke)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Studi Literatur	■	■	■									
2	Pengumpulan data penelitian dari Instansi terkait				■	■							
3	Tabulasi, pengolahan dan analisis data					■	■						
4	Penyusunan laporan						■	■					
5	Pembuatan artikel jurnal dan seminar hasil penelitian							■	■	■	■		
6	Penyerahan hasil laporan Penelitian											■	■

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmaddien, Iskandar. 2019. Faktor determinan keparahan dan kedalaman kemiskinan jawa barat dengan regresi data panel. *Forum Ekonomi*. 21 (1) 87-96
- Bappenas, 2004, *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan)*, Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Chambers, 1998. *Rural Development Putting the Last First*. Published by Longmann. Inc. UK
- Haughton, Jonathan dan Khandker Shahidur R. 2012. *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Juanda, Bambang dan Junaidi. 2012. *ekonometrika deret waktu*. Bogor: IPB Press
- Kuncoro, Mudrajat. 2010. *Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Lanjouw et al. (2001), *Poverty Education and health in Indonesia: Whi Benefit From Public Spending*. World Bank Discusiion Paper, Washington.
- Latifah, E. (2017). Harmonisasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Yang Berorientasi pada Millenium Development Goals. *Jurnal Dinamika Hukum*. 11(3), 391-401
- Leonita, L. Sari, RK. 2019. Pengaruh PDRB, Pengangguran Dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. 3 (2) 1-8

- Mulyaningsih, Y. (2008). Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik terhadap peningkatan pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan. Tesis: Universitas Indonesia
- Ningrum, S. S. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 184-192
- Sastraatmadja, Entang. 2007. Dampak Sosial Pembangunan. Bandung: Angkasa
- Suharto, Edi. 2010, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia. Bandung Alfabeta.
- Suryawati, 2005, Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional (Understanding Multidimension Of Poverty), Semarang : Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, JMPK Vol. 08/No.03/September/2005
- Todaro, Michael P. 2006. "Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga". Alih Bahasa: Amminudin dan Drs. Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2011. Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesebelas Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga